



**KOMISI INFORMASI DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Gedung Diskominfo DIY Lantai 2, Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152  
Telepon/Fax : (0274) 374289, E-mail: [kip-diy@jogjaprov.go.id](mailto:kip-diy@jogjaprov.go.id), Website: [komisi-informasi.jogjaprov.go.id](http://komisi-informasi.jogjaprov.go.id)

---

**MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK NEGARA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2018**

**1. Pendahuluan**

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, membawa konsekuensi perubahan paradigma ke arah keterbukaan. Bagi lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, penyelenggara negara maupun lembaga/organisasi yang mengelola bantuan luar negeri maupun dana masyarakat, harus memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, juga mengamanatkan kepada Komisi Informasi untuk menjalankan Undang-undang ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23: *"Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaan, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi"*.

Pada Pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Monitoring dan Evaluasi kepada badan publik dilakukan satu kali dalam setahun dan disampaikan ke badan publik kemudian diumumkan ke publik.

**2. Dasar Kegiatan, Maksud dan Tujuan**

Kegiatan monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik di DIY didasarkan pada Pasal 23 UU 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk melaksanakan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik.

Adapun maksud dilaksanakannya evaluasi adalah untuk mengetahui terpenuhinya hak publik dalam mendapatkan layanan informasi publik yang dilakukan Badan Publik. Sedangkan tujuan dari evaluasi ini untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Badan Publik dalam melaksanakan kewajibannya memberikan informasi Publik kepada setiap warga negara.

### **3. Proses dan Mekanisme**

Tahun ini adalah Tahun keempat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan metode yang telah dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih terukur dalam konteks wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP) dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA). Sejak dari penyusunan instrumen penilaian, penyusunan daftar kuesioner hingga penentuan pemenang. Kedua institusi ini kami ajak dalam rangka merumuskan instrumen penilaian sehingga secara metodologis, monitoring dan evaluasi ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Sebelum dilakukan Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Daerah DIY melakukan sosialisasi kepada Badan Publik pada tanggal 25 April 2018 yang bertempat di Aula Diskominfo DIY.

Tim Monev menyepakati beberapa ketentuan pokok antara lain bahwa kategori yang dimonev terdiri dari :

- a. PPID Utama Se-DIY
- b. OPD Pemerintah Daerah DIY
- c. Instansi Vertikal Se-DIY
- d. Lembaga Yudikatif Se-DIY
- e. Lembaga Legislatif Se-DIY
- f. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY
- g. Kecamatan Se-DIY
- h. BUMD Se-DIY
- i. Partai Politik Se-DIY

Khusus Penilaian untuk kategori PPID Utama, Legislatif dan Parpol ada perubahan ketentuan yang disebabkan karena :

1. Kategori PPID Utama tidak dilakukan tahapan uji akses dikarenakan dari Total 6 PPID utama hanya 5 PPID utama yang mengembalikan Kuesioner

dan ada perubahan pembobotan yaitu kuesioner 15 persen Website 40 persen, Visitasi 30 persen, Presentasi 15 persen.

2. Kategori Legislatif tidak dilakukan pemeringkatan dikarenakan hanya 2 Badan Publik yang mengembalikan Kuesioner.
3. Kategori Partai Politik tidak dilakukan pemeringkatan dikarenakan karena dari 10 Parpol yang dikirim kuesioner tidak ada yang mengembalikan.

Tahun ini, Tim Monev menambah 2 tahapan krusial untuk menentukan peringkat nominator terbaik. Setelah menyebarkan angket kuisisioner, pencermatan website badan publik, dan visitasi, dua tahapan krusial itu adalah uji akses yang dilakukan oleh para mahasiswa UNISA dan Presentasi Badan Publik dihadapan Tim Penilai. Tim juga menyepakati bahwa bobot nilai kuesioner sebesar 15 persen, website 40 persen, Uji Akses 15 persen, visitasi 20 persen serta presentasi 10 persen. Besarnya bobot nilai website karena informasi yang diunggah melalui mekanisme yang bertahap, serta dapat diakses dari seluruh dunia.

Untuk mendapatkan hasil yang presisi sesuai dengan realitas implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik, Komisi Informasi Daerah DIY melakukan 5 (lima) tahapan penilaian:

**Tahap Pertama** memiliki bobot 15%, Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*) ke seluruh Badan Publik. Penilaian yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Publik dengan mengisi kuesioner yang dikirimkan oleh KID DIY ataupun yang diunduh melalui *website* KID DIY, Selanjutnya seluruh badan publik yang mengembalikan kuesioner tersebut kemudian dinilai oleh Tim Monev. Tahapan dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018 – 08 Juli 2018.

**Tahap Kedua** memiliki bobot 40%, Verifikasi *Website* atau pencermatan *Website* oleh Tim Monev berdasarkan badan publik yang mengembalikan kuesioner penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*). Tahapan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2018 – 03 Agustus 2018.

**Tahap Ketiga** memiliki bobot 15%, Uji Akses yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ke sejumlah Badan Publik yang masuk nominasi Uji Akses berdasarkan hasil nilai tahap kesatu dan kedua. Tahapan dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2018 – 31 Agustus 2018.

**Tahap Keempat** memiliki bobot 20%, Visitasi ke sejumlah Badan Publik yang masuk dalam nominasi berdasarkan penilaian tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Visitasi dilakukan dengan wawancara dan pembuktian secara langsung dokumen-dokumen atau informasi dalam berbagai format/kemasan berdasarkan keterangan tertulis dalam SAQ dan dikonversikan dengan nilai sesuai pandangan Tim Monitoring dan Evaluasi

badan publik Tahun 2018. Tahapan dilakukan pada tanggal 03 September 2018 – 13 September 2018.

**Tahap Kelima** memiliki bobot 10%, Presentasi yang dilaksanakan oleh Pimpinan Badan Publik yang masuk nominasi tahapan kesatu sampai keempat dihadapan Tim Monev KID DIY Tahun 2018 untuk mengetahui sejauh mana komitmen Pimpinan Badan Publik terhadap pelayanan informasi di Badan Publik. Tahapan dilakukan pada tanggal 24 September 2018.

Dari tahapan pertama dan kedua maka dapat diketahui jumlah nilai yang diperoleh. Dari Badan Publik yang memperoleh nilai tinggi, kami ambil sebanyak 3 kali dari masing-masing kategori, untuk dilakukan Uji Akses. Kemudian dari nilai Uji Akses yang diperoleh kemudian diambil sebanyak 2 kali dari masing-masing kategori untuk masuk tahapan visitasi. Tahapan Presentasi dilakukan terakhir untuk menentukan Badan Publik terbaik kesatu, kedua dan ketiga masing-masing kategori kecuali kategori OPD Kabupaten/Kota menentukan Terbaik kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima.

Kelima tahapan penilaian tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mencermati sejauh mana informasi publik dikuasai badan publik berdasarkan Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Informasi tersebut yakni informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Hal ini penting agar badan publik memiliki pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mengelola informasi publik.

#### 4. Data Pengembalian Kuesioner

Dari sebanyak 385 kuesioner yang dikirimkan/diunduh sebanyak 217 atau 56% dari total 100% Badan Publik yang mengisi dan mengembalikan. Hanya Badan Publik yang mengembalikan kuesioner yang dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya, serta jumlahnya sesuai dengan kuota sesuai kategori yang kami tentukan di atas. Rinciannya sebagai berikut:

#### DATA PENGEMBALIAN KUESIONER (SAQ)

#### MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2018

No	Kategori Monev	Nama Badan Publik	Jumlah Pengiriman	Jumlah Pengembalian	Total Pengiriman	Total Pengembalian	Persentase Pengembalian
1	PPID Utama	PPID Utama	6	5	6	5	<b>83%</b>
2	Pemda DIY	Pemda DIY	37	27	37	27	<b>73%</b>
3	OPD Kabupaten/	Pemkot Yogyakarta	37	30	163	101	<b>62%</b>

	Kota Se-DIY	Pemkab Sleman	30	28			
		Pemkab Bantul	36	9			
		Pemkab Kulon Progo	29	24			
		Pemkab Gunungkidul	31	10			
4	Kecamatan Se-DIY	Kecamatan Yogyakarta	14	9	78	41	<b>53%</b>
		Kecamatan Sleman	17	17			
		Kecamatan Bantul	17	5			
		Kecamatan Kulon Progo	12	8			
		Kecamatan Gunungkidul	18	2			
5	Yudikatif	Yudikatif	20	15	20	15	<b>75%</b>
6	Legislatif	Legislatif	6	2	6	2	<b>33%</b>
7	Vertikal	Vertikal	47	14	47	14	<b>30%</b>
8	BUMD	BUMD	18	12	18	12	<b>67%</b>
9	PARPOL	PARPOL	10	0	10	0	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>					<b>385</b>	<b>217</b>	<b>56%</b>

Penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*) oleh KID DIY sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima), sedang badan publik yang mengembalikan berjumlah 217 (dua ratus tujuh belas) atau 56%.

## 5. Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian. Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Negara di wilayah DIY tahun 2018, kemudian menetapkan :

### 1) **Nominasi** untuk Kategori :

- a. PPID Utama Se-DIY : Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3
- b. OPD Pemerintah Daerah DIY : Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3
- c. Instansi Vertikal : Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3
- d. Lembaga Yudikatif : Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3
- e. OPD Pemda Kabupaten/Kota : Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3, Terbaik 4, Terbaik 5
- f. Kecamatan : Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3

- g. BUMD Se-DIY : Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3
- 2) Mengklasifikasikan total nilai dari 5 (lima) tahapan berdasarkan **Nominasi** yang sudah ditetapkan dengan kualifikasi :
- a. Informatif : Total Nilai 95 - 100
- b. Menuju Informatif : Total Nilai 80 - 94
- c. Cukup Informatif : Total Nilai 60 - 79
- d. Kurang Informatif : Total Nilai 40 - 59
- e. Tidak Informatif : Total Nilai 0 - 39
- 3) Penghargaan **Apresiasi** :
- a. Kepada Kepolisian Daerah (POLDA) DIY yang konsisten memberikan Laporan Akes Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah DIY.
- b. Kepada DPRD Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Bantul yang telah berpartisipasi dalam aktif dalam kegiatan ini.

### 5.1. Daftar Penerima Penghargaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018

#### A. Kategori: PPID Utama Pemerintah Daerah Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat	Kualifikasi
1	PPID Utama Pemkot Yogyakarta	81,15	TERBAIK 1	Menuju Informatif
2	PPID Utama Pemkab Sleman	68,80	TERBAIK 2	Cukup Informatif
3	PPID Utama Pemda DIY	65,40	TERBAIK 3	Cukup Informatif

#### B. Kategori: OPD Pemerintah Daerah DIY

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat	Kualifikasi
1	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	87,62	TERBAIK 1	Menuju Informatif
2	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY	74,65	TERBAIK 2	Cukup Informatif
3	Badan Kepegawaian Daerah DIY	73,83	TERBAIK 3	Cukup Informatif

#### C. Kategori: Instansi Vertikal

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat	Kualifikasi
1	Perwakilan BPKP DI Yogyakarta	95,15	TERBAIK 1	Informatif
2	BPK Perwakilan Prov. DIY	64,07	TERBAIK 2	Cukup Informatif
3	KPU DIY	59,76	TERBAIK 3	Kurang Informatif

D. Kategori: Lembaga Yudikatif

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat	Kualifikasi
1	Pengadilan Agama wates	95,25	TERBAIK 1	Informatif
3	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	86,02	TERBAIK 2	Menuju Informatif
2	Pengadilan Negeri Bantul	85,23	TERBAIK 3	Menuju Informatif

E. Kategori: OPD Kabupaten/Kota Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat	Kualifikasi
1	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Sleman	91,84	TERBAIK 1	Menuju Informatif
2	Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul	91,43	TERBAIK 2	Menuju Informatif
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Sleman	90,45	TERBAIK 3	Menuju Informatif
4	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Sleman	89,12	TERBAIK 4	Menuju Informatif
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	87,50	TERBAIK 5	Menuju Informatif

F. Kategori: Kecamatan Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat	Kualifikasi
----	-------------------	-------------	-----------	-------------

1	Kecamatan Depok	93,05	TERBAIK 1	Menuju Informatif
2	Kecamatan Ngemplak	80,21	TERBAIK 2	Menuju Informatif
3	Kecamatan Mergangsan	64,87	TERBAIK 3	Cukup Informatif

G. Kategori: BUMD Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat	Kualifikasi
1	PD BPR Bank Sleman	84,87	TERBAIK 1	Menuju Informatif
2	PD. BPR Bank Jogja	54,92	TERBAIK 2	Kurang Informatif
3	PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo	52,55	TERBAIK 3	Kurang Informatif

**5.2. Daftar perolehan nilai dari tahapan kesatu sampai kelima Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018.**

A. Kategori: PPID Utama Pemerintah Daerah Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian				Total Nilai
		SAQ	Website	Visitasi	Presentasi	
		15 %	40 %	30 %	15 %	
1	PPID Utama Pemkot Yogyakarta	14,25	41,60	17,00	8,30	81,15
2	PPID Utama Pemkab Sleman	14,37	30,48	14,20	9,75	68,80
3	PPID Utama Pemda DIY	14,28	22,92	19,20	9,00	65,40
4	PPID Utama Pemkab Kulon Progo	10,78	15,48	19,00	0,00	45,26
5	PPID Utama Pemkab Bantul	11,18	4,16	8,80	0,00	24,14

Note : Khusus untuk kategori PPID Utama tidak dilakukan tahapan uji akses dikarenakan dari Total 6 PPID utama hanya 5 PPID utama yang mengembalikan Kuesioner dan ada perubahan pembobotan: SAQ/Kuesioner 15%, Website 40%, Visitasi 30%, Presentasi 15%.

B. Kategori: OPD Pemerintah Daerah DIY

No	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian
----	-------------------	-------------------



		SAQ	Website	Uji Akses	Visitasi	Presentasi	Total Nilai
		15%	40%	15%	20%	10%	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	13,48	34,84	15,00	18,00	6,30	87,62
2	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY	12,15	22,80	12,00	19,00	8,70	74,65
3	Badan Kepegawaian Daerah DIY	12,38	26,00	12,75	16,40	6,30	73,83
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	12,45	27,80	11,25	12,20	0,00	63,70
5	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY	12,07	23,00	13,50	14,60	0,00	63,17
6	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga DIY	12,97	20,00	13,50	2,60	0,00	49,07
7	Dinas Pariwisata DIY	11,00	21,84	11,25	0,00	0,00	44,09
8	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	11,28	20,80	8,25	0,00	0,00	40,33
9	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPAD DIY)	7,90	18,20	7,50	0,00	0,00	33,60
10	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY	14,10	6,80	9,75	0,00	0,00	30,65
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY	10,65	14,40	0,00	0,00	0,00	25,05
12	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	11,37	11,60	0,00	0,00	0,00	22,97
13	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	10,30	11,60	0,00	0,00	0,00	21,90
14	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	10,13	10,80	0,00	0,00	0,00	20,93
15	Dinas Sosial DIY	12,32	7,44	0,00	0,00	0,00	19,76
16	Dinas Kesehatan DIY	12,95	2,64	0,00	0,00	0,00	15,59
17	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	10,42	4,40	0,00	0,00	0,00	14,82
18	Badan Lingkungan Hidup DIY	12,00	2,16	0,00	0,00	0,00	14,16

19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan & Energi Sumber Daya Mineral	9,23	4,44	0,00	0,00	0,00	13,67
20	Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta	8,35	4,80	0,00	0,00	0,00	13,15
21	Biro Organisasi SETDA DIY	9,73	2,64	0,00	0,00	0,00	12,37
22	Rumah Sakit Paru Respira DIY	11,62	0,64	0,00	0,00	0,00	12,26
23	Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam SETDA DIY	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43
24	Rumah Sakit Jiwa Ghrasia DIY	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85
25	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM)	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97
26	Biro Hukum Setda Daeah Istimewa Yogyakarta	7,15	2,48	0,00	0,00	0,00	9,63
27	Dinas Kebudayaan DIY	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75

C. Kategori: OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY

NO	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian					Total Nilai
		SAQ	Website	Uji Akses	Visitasi	Persentasi	
		15%	40%	15%	20%	10%	
1	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Sleman	14,00	37,44	15,00	16,80	8,60	91,84
2	Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul	13,08	39,60	12,75	16,00	10,00	91,43
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Sleman	14,45	35,60	15,00	16,80	8,60	90,45
4	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Sleman	14,12	32,00	15,00	18,00	10,00	89,12
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	13,25	39,00	11,25	17,00	7,00	87,50
6	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Sleman	10,82	34,88	15,00	14,00	0,00	74,70

7	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	11,90	29,20	13,50	19,60	0,00	74,20
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Sleman	11,53	31,60	15,00	16,00	0,00	74,13
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Persandian Kota Yogyakarta	12,38	30,64	13,13	17,40	0,00	73,55
10	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman	11,92	35,84	12,75	6,00	0,00	66,51
11	Dinas Sosial Sleman	9,43	28,04	13,13	0,00	0,00	50,60
12	BKPP Kota Yogyakarta	12,48	27,44	9,38	0,00	0,00	49,30
13	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	13,53	26,84	8,25	0,00	0,00	48,62
14	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo	12,38	28,44	4,13	0,00	0,00	44,95
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Kulon Progo	11,67	25,64	5,63	0,00	0,00	42,93
16	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta	12,58	24,60	0,00	0,00	0,00	37,18
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo	12,30	24,64	0,00	0,00	0,00	36,94
18	RSUD Kab. Sleman	10,45	25,60	0,00	0,00	0,00	36,05
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sleman	5,97	29,80	0,00	0,00	0,00	35,77
20	Dinas PMPT Kab. Kulon Progo	12,75	22,84	0,00	0,00	0,00	35,59
21	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kulon Progo	11,22	24,20	0,00	0,00	0,00	35,42
22	Dinas Sosial Kab. Gunungkidul	12,68	22,24	0,00	0,00	0,00	34,92
23	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sleman	11,67	23,20	0,00	0,00	0,00	34,87

24	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	7,63	27,00	0,00	0,00	0,00	34,63
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	14,30	19,64	0,00	0,00	0,00	33,94
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo	9,45	24,20	0,00	0,00	0,00	33,65
27	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	10,30	23,20	0,00	0,00	0,00	33,50
28	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	10,85	21,28	0,00	0,00	0,00	32,13
29	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman	10,87	20,64	0,00	0,00	0,00	31,51
30	Inspektorat Kab. Sleman	12,62	18,40	0,00	0,00	0,00	31,02
31	Dinas Perhubungan Kab. Sleman	10,60	18,24	0,00	0,00	0,00	28,84
32	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta	6,35	20,80	0,00	0,00	0,00	27,15
33	DPUP-KP Kab. Kulon Progo	8,98	17,80	0,00	0,00	0,00	26,78
34	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	11,10	14,88	0,00	0,00	0,00	25,98
35	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kulon Progo	6,50	19,24	0,00	0,00	0,00	25,74
36	Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo	6,03	19,40	0,00	0,00	0,00	25,43
37	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	9,37	15,64	0,00	0,00	0,00	25,01
38	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Gunungkidul	10,28	14,48	0,00	0,00	0,00	24,76
39	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	13,30	11,40	0,00	0,00	0,00	24,70
40	RSUD Wates Kab. Kulon Progo	11,10	13,44	0,00	0,00	0,00	24,54

41	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sleman	8,03	16,40	0,00	0,00	0,00	24,43
42	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman	11,17	12,80	0,00	0,00	0,00	23,97
43	Dinas Tenaga Kerja Dan Trasnigrasi Kab. Kulon Progo	8,93	14,24	0,00	0,00	0,00	23,17
44	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	7,87	14,80	0,00	0,00	0,00	22,67
45	Dinas P3AP2KB Kab. Sleman	9,42	12,80	0,00	0,00	0,00	22,22
46	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan Kab. Sleman	7,07	15,04	0,00	0,00	0,00	22,11
47	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	12,68	8,24	0,00	0,00	0,00	20,92
48	RSUD Kota Yogyakarta	13,08	6,64	0,00	0,00	0,00	19,72
49	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Bantul	11,17	7,64	0,00	0,00	0,00	18,81
50	Rsud Prambanan Kab. Sleman	13,05	5,44	0,00	0,00	0,00	18,49
51	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Kulon Progo	7,77	10,64	0,00	0,00	0,00	18,41
52	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo	9,70	8,60	0,00	0,00	0,00	18,30
53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Sleman	8,33	9,84	0,00	0,00	0,00	18,17
54	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul	13,57	4,12	0,00	0,00	0,00	17,69
55	Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo	7,03	10,64	0,00	0,00	0,00	17,67
56	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Bantul	5,65	12,00	0,00	0,00	0,00	17,65
57	Dinas Sosial Kota Yogyakarta	10,28	7,20	0,00	0,00	0,00	17,48

58	Dinas Pendidikan Kab. Sleman	13,52	3,60	0,00	0,00	0,00	17,12
59	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta	7,32	9,60	0,00	0,00	0,00	16,92
60	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kab. Gunungkidul	12,48	4,24	0,00	0,00	0,00	16,72
61	Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo	8,05	8,20	0,00	0,00	0,00	16,25
62	Dinas Pertanian Dan Pangan Kab. Kulon Progo	12,25	3,48	0,00	0,00	0,00	15,73
63	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Kulon Progo	12,95	2,64	0,00	0,00	0,00	15,59
64	Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta	10,08	5,44	0,00	0,00	0,00	15,52
65	Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman	12,38	2,64	0,00	0,00	0,00	15,02
66	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	7,52	6,80	0,00	0,00	0,00	14,32
67	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta	10,10	3,28	0,00	0,00	0,00	13,38
68	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	13,15	0,16	0,00	0,00	0,00	13,31
69	Bagian Administrasi Dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta	7,85	5,44	0,00	0,00	0,00	13,29
70	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul	7,52	5,60	0,00	0,00	0,00	13,12
71	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gunungkidul	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
72	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82
73	Dinas Kebudayaan Kab. Kulon Progo	9,30	3,48	0,00	0,00	0,00	12,78
74	Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30

75	Inspektorat Kab. Kulon Progo	7,78	4,32	0,00	0,00	0,00	12,10
76	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	11,47	0,48	0,00	0,00	0,00	11,95
77	Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD Dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta	6,47	5,44	0,00	0,00	0,00	11,91
78	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Gunungkidul	10,12	0,32	0,00	0,00	0,00	10,44
79	Dinas DP3AKBMD Kab. Gunungkidul	6,30	3,76	0,00	0,00	0,00	10,06
80	Sekretariat Daerah Kab. Sleman	7,88	1,28	0,00	0,00	0,00	9,16
81	Bagian Tata Pemerintahan Dan Kesra Setda Kota Yogyakarta	8,52	0,48	0,00	0,00	0,00	9,00
82	Inspektorat Kota Yogyakarta	8,47	0,48	0,00	0,00	0,00	8,95
83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	8,35	0,48	0,00	0,00	0,00	8,83
84	Sekretariat Daerah Kab. Gunungkidul	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
85	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo	5,00	3,60	0,00	0,00	0,00	8,60
86	DIKPORA Kab. Bantul	6,95	1,64	0,00	0,00	0,00	8,59
87	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Gunungkidul	7,95	0,48	0,00	0,00	0,00	8,43
88	Dinas Kesehatan Kab. Sleman	7,77	0,48	0,00	0,00	0,00	8,25
89	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo	4,50	3,64	0,00	0,00	0,00	8,14
90	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	7,47	0,64	0,00	0,00	0,00	8,11
91	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08

92	BPKAD Kota Yogyakarta	3,32	3,28	0,00	0,00	0,00	6,60
93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta	4,92	1,44	0,00	0,00	0,00	6,36
94	Bagian Protokol Setda Kota Yogyakarta	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33
95	Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Yogyakarta	5,48	0,48	0,00	0,00	0,00	5,96
96	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kab. Gunungkidul	5,22	0,48	0,00	0,00	0,00	5,70
97	Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Yogyakarta	4,98	0,48	0,00	0,00	0,00	5,46
98	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab.Bantul	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
99	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	2,73	2,24	0,00	0,00	0,00	4,97
100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta	1,17	0,32	0,00	0,00	0,00	1,49
101	Dinas Pariwisata Kab.Kulon Progo	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16

#### D. Kategori: Instansi Vertikal

No	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian					Total Nilai
		SAQ	Website	Uji Akses	Visitasi	Persentasi	
		15%	40%	15%	20%	10%	
1	Perwakilan BPKP DI Yogyakarta	14,75	36,00	15,00	19,40	10,00	95,15
2	BPK Perwakilan Prov. DIY	11,32	14,40	12,00	19,20	7,15	64,07
3	KPU DIY	14,77	5,44	15,00	19,00	5,55	59,76
4	POLDA DIY	8,87	9,84	15,00	19,00	0,00	52,71
5	KPU Kab. Bantul	13,53	3,28	15,00	12,80	0,00	44,61
6	Bawaslu DIY	9,08	4,08	12,00	11,10	0,00	36,26



7	Polres Bantul	10,43	1,12	10,50	0,00	0,00	22,05
8	Kemenag Kab. Sleman	11,52	0,00	9,75	0,00	0,00	21,27
9	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN BANTUL	8,28	9,60	1,88	0,00	0,00	19,76
10	Kantor Kemenag Bantul	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77
11	KPU Kab. Kulon Progo	6,95	1,60	0,00	0,00	0,00	8,55
12	Kemenag Kab. Gunungkidul	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48
13	Kantor Pertanahan Kab. Kulon Progo	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53
14	Korem 072 Pamungkas	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12

#### E. Kategori: Lembaga Yudikatif

No	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian					Total Nilai
		SAQ	Website	Uji Akses	Visitasi	Persentasi	
		15%	40%	15%	20%	10%	
1	Pengadilan Agama wates	14,85	41,00	15,00	16,40	8,00	95,25
3	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	13,52	33,00	15,00	15,80	8,70	86,02
2	Pengadilan Negeri Bantul	14,28	36,00	12,00	16,00	6,95	85,23
4	Pengadilan Negeri Wonosari	9,55	28,80	15,00	17,40	0,00	70,75
5	Pengadilan Negeri Sleman	9,62	31,00	12,75	16,00	0,00	69,37
6	Pengadilan Negeri Yogyakarta	14,40	25,80	13,50	15,40	0,00	69,10
7	Pengadilan Agama Bantul	10,05	27,80	12,00	0,00	0,00	49,85
8	Pengadilan Agama Sleman	12,62	19,44	15,00	0,00	0,00	47,06
9	Pengadilan Agama Wonosari	9,55	24,24	4,13	0,00	0,00	37,92

10	Pengadilan Agama Yogyakarta	9,35	22,24	0,00	0,00	0,00	31,59
11	Pengadilan Negeri Wates	14,20	15,84	0,00	0,00	0,00	30,04
12	Kejaksaan Tinggi DIY	11,85	11,60	0,00	0,00	0,00	23,45
13	Kejaksaan Negeri Kulon Progo	9,07	10,20	0,00	0,00	0,00	19,27
14	Kejaksaan Negeri Yogyakarta	5,25	13,60	0,00	0,00	0,00	18,85
15	Kejaksaan Negeri Gunungkidul	11,00	3,60	0,00	0,00	0,00	14,60

#### F. Kategori: Kecamatan Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian					Total Nilai
		SAQ	Website	Uji Akses	Visitasi	Persentasi	
		15%	40%	15%	20%	10%	
1	Kecamatan Depok	14,35	36,60	15,00	18,40	8,70	93,05
2	Kecamatan Ngemplak	11,67	31,64	15,00	15,20	6,70	80,21
3	Kecamatan Mergangsan	9,08	14,84	15,00	18,20	7,75	64,87
4	Kecamatan Godean	8,35	23,80	8,25	15,60	0,00	56,00
5	Kecamatan Girimulyo	13,77	18,00	7,88	15,40	0,00	55,04
6	Kecamatan Tegalrejo	6,55	18,32	12,75	8,70	0,00	46,32
7	Kecamatan Gedongtengen	9,05	15,60	12,75	0,00	0,00	37,40
8	Kecamatan Berbah	9,02	16,40	8,25	0,00	0,00	33,67
9	Kecamatan Galur	8,72	17,80	1,50	0,00	0,00	28,02
10	Kecamatan Wirobrajan	2,80	19,60	0,00	0,00	0,00	22,40
11	Kecamatan Kokap	11,67	9,08	0,00	0,00	0,00	20,75

12	Kecamatan Samigaluh	11,68	7,08	0,00	0,00	0,00	18,76
13	Kecamatan Cangkringan	10,63	7,84	0,00	0,00	0,00	18,47
14	Kecamatan Panjatan	13,10	3,48	0,00	0,00	0,00	16,58
15	Kecamatan Kalasan	8,28	8,00	0,00	0,00	0,00	16,28
16	Kecamatan Ngampilan	8,93	6,32	0,00	0,00	0,00	15,25
17	Kecamatan Pandak	8,08	6,28	0,00	0,00	0,00	14,36
18	Kecamatan Wates	11,38	2,72	0,00	0,00	0,00	14,10
19	Kecamatan Nanggulan	7,07	6,44	0,00	0,00	0,00	13,51
20	Kecamatan Moyudan	9,02	4,48	0,00	0,00	0,00	13,50
21	Kecamatan Seyegan	9,23	3,44	0,00	0,00	0,00	12,67
22	Kecamatan Lendah	9,02	3,64	0,00	0,00	0,00	12,66
23	Kecamatan Mlati	12,18	0,16	0,00	0,00	0,00	12,34
24	Kecamatan Danurejan	8,82	2,44	0,00	0,00	0,00	11,26
25	Kecamatan Kotagede	7,80	3,44	0,00	0,00	0,00	11,24
26	Kecamatan Jetis Bantul	9,80	1,12	0,00	0,00	0,00	10,92
27	Kecamatan Sanden	7,32	3,08	0,00	0,00	0,00	10,40
28	Kecamatan Tempel	8,70	1,44	0,00	0,00	0,00	10,14
29	Kecamatan Wonosari	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
30	Kecamatan Srandakan	8,33	0,88	0,00	0,00	0,00	9,21

31	Kecamatan Kraton	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
32	Kecamatan Gamping	3,48	3,44	0,00	0,00	0,00	6,92
33	Kecamatan Pakem	1,90	4,84	0,00	0,00	0,00	6,74
34	Kecamatan Mantrijeron	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
35	Kecamatan Turi	3,92	1,84	0,00	0,00	0,00	5,76
36	Kecamatan Ngaglik	4,55	0,56	0,00	0,00	0,00	5,11
37	Kecamatan Banguntapan	3,82	1,28	0,00	0,00	0,00	5,10
38	Kecamatan Minggir	3,85	0,48	0,00	0,00	0,00	4,33
39	Kecamatan Sleman	3,90	0,32	0,00	0,00	0,00	4,22
40	Kecamatan Tepus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
41	Kecamatan Prambanan	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60

#### G. Kategori: BUMD Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian					Total Nilai
		SAQ	Website	Uji Akses	Visitasi	Persentasi	
		15%	40%	15%	20%	10%	
1	PD BPR Bank Sleman	14,77	29,60	13,50	18,80	8,20	84,87
2	PD. BPR Bank Jogja	9,67	17,60	11,25	10,00	6,40	54,92
3	PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo	8,90	14,00	12,75	10,00	6,90	52,55
4	PT. Bank BPD DIY	8,35	24,00	1,50	11,00	0,00	44,85
5	PD. Jogjatama Vishesa	10,65	8,80	11,25	11,10	0,00	41,80
6	PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul	7,60	16,40	8,25	7,20	0,00	39,45

7	PDAM Tirta Handayani Gunungkidul	8,67	3,60	15,00	0,00	0,00	27,27
8	PDAM Kab. Bantul	11,17	4,80	8,25	0,00	0,00	24,22
9	PT. Anindya Mitra Internasional (AMI)	3,63	7,60	11,25	0,00	0,00	22,48
10	PD. BPR Bank Bantul	8,90	0,40	0,00	0,00	0,00	9,30
11	PERUMDA "ANEKA USAHA KULON PROGO"	3,00	5,60	0,00	0,00	0,00	8,60
12	PT. Selo Adikarto Kulon Progo	5,18	0,40	0,00	0,00	0,00	5,58

## 6. Kondisi Umum dan Pembelajaran

Dari serangkaian proses monitoring dan evaluasi Tim Monev mendapatkan beberapa catatan yang menarik, antara lain:

### a. Kondisi Umum:

Badan Publik masih belum banyak yang menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik khususnya Pasal 11,12 dan 13. Badan Publik masih sedikit yang menyediakan Informasi Berkala yang berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan serta tugas dan fungsinya. Dalam hal informasi tentang program dan kegiatan, masih sedikit yang menyediakan jadwal, target dan capaian kegiatan. Bahkan Badan Publik yang dimonitoring dan evaluasi, masih sangat sedikit yang membuat ringkasan akses informasi publik.

### b. Catatan Khusus

Dari berbagai hal yang ditemui selama monitoring dan evaluasi, terdapat catatan khusus yang perlu mendapat perhatian dari Badan Publik antara lain:

1. Badan Publik belum membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik dan menyampaikan salinannya ke Komisi Informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf j, Perki 1 Tahun 2010;
2. Pemahaman atas UU KIP masih perlu ditingkatkan karena mayoritas petugas PLID tidak tahu UU KIP dan Perki.
3. Masih ada kerancuan dalam memahami frase "informasi publik" sebagaimana dimaksud pada UU KIP dan informasi publik yang terkait dengan layanan *core business*

4. Belum tersedianya ruang khusus untuk PPID.
5. Belum tersedia komputer khusus bagi para pemohon untuk mengakses sendiri informasi publik yang dimaksud.
6. Masih ada Badan Publik yang tidak mempunyai Formulir Permohonan Informasi di meja layanan informasi.
7. Tidak adanya alur atau petunjuk yang jelas dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.
8. Perlu adanya pemisahan yang jelas antara PPID Utama dengan Diskominfo karena cakupan PPID Utama lebih luas agar tidak tumpang tindih tugas dan fungsi.
9. Bagan Struktur Organisasi yang disediakan PPID Utama berupa bagan struktur organisasi PPID, padahal mestinya PPID utama sebagai pengelola informasi publik Pemerintah Daerah, yang disediakan berupa Struktur Organisasi di lingkup Pemerintah Daerah;
10. Masih sangat sedikit Badan Publik yang menyediakan informasi serta merta, yang berupa informasi kedaruratan di lokasi Badan Publik, seperti petunjuk arah evakuasi, titik kumpul dsb.

**c. Nilai Pembelajaran:**

Selama proses monitoring dan evaluasi, khususnya saat dilakukan visitasi, terdapat pembelajaran yang dapat diambil nilainya untuk ditularkan ke Badan Publik lainnya antara lain:

1. Kreativitas PPID melakukan rekap setiap akhir bulan secara rutin atas buku register layanan informasi publik dan ditandatangani PPID. Bahkan Pimpinan Badan Publik juga secara rutin melakukan supervisi terhadap pengelolaan dokumen yang dilakukan PPID;
2. Perlu peningkatan pemahaman mengenai UU KIP dan peraturan pelaksanaannya di Level PPID dan PLID.
3. Perlu ruangan khusus untuk layanan informasi yang terintegrasi dengan berbagai bidang dan Komputer khusus untuk layanan informasi.
4. Perlu dibuat sistem pendokumentasian yang merujuk pada UU KIP meskipun tempat penyimpanan dokumen menyatu dengan dokumen layanan lainnya.
5. Badan Publik perlu memberikan petunjuk arah bagi masyarakat yang akan mengakses layanan Badan Publik, sehingga memudahkan masyarakat.

**7. Penutup**

Selamat kepada pemenang. Semoga tidak cepat berpuas diri, sehingga dapat terus semangat dalam meningkatkan budaya keterbukaan informasi publik di lembaga masing-masing. Dan bagi yang belum menjadi pemenang,

semoga tidak berkecil hati, harus lebih termotivasi lagi dengan segera mengevaluasi, mengoreksi, dan memperbaiki praktek keterbukaan informasi publik yang berjalan selama ini di lembaga masing-masing. Kami haturkan terima kasih juga kepada Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP) beserta para Penelitinya dan Rektor Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) Para Pimpinan Badan Publik di DIY, serta semua pihak yang telah mendukung monitoring dan evaluasi ini. Kami berharap monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari pembelajaran kita semua untuk menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 01 Oktober 2018

Ketua  
Komisi Informasi Daerah DIY



(Hazwan Iskandar Jaya, SP)